

DAMPAK ARUS INFORMASI BAGI MASYARAKAT DI NEGARA BERKEMBANG

Ulfah Andayani

Staf Perpustakaan Fak. Dakwah – IAIN Jakarta

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang besar dalam kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi. Dengan bantuan teknologi informasi manusia dapat dengan mudah memproduksi, mengolah, dan bahkan memanipulasi informasi untuk berbagai kepentingan. Bagi masyarakat di negara-negara berkembang, kehadiran perangkat teknologi informasi di samping telah membawa 'berkah', juga tidak jarang menimbulkan kegelisahan, baik psikologis maupun sosial. Secara psikologis, membanjirnya informasi di tengah-tengah masyarakat telah menimbulkan apa yang disebut dengan 'infoglut' di mana masyarakat merasa kewalahan karena banyaknya informasi yang diterimanya. Sementara secara sosial, timbul pula apa yang disebut 'shock culture' akibat pesan-pesan yang terkandung di dalam suatu informasi menimbulkan pergesakan dan pertentangan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Teknologi informasi yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang dilematis, dan karena itu harus disikapi secara proporsional dan bijaksana.

Pendahuluan

Menurut banyak kalangan, abad ke-21 atau disebut juga era milenium ketiga, akan ditandai banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah berperan menciptakan suatu tatanan dunia baru yang oleh John Naisbitt disebutnya dengan "Era Globalisasi" (J. Naisbitt dan Aburdene, 1990;10). Kemajuan di bidang IPTEK ini terutama di tandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Karena itu oleh Toffler sering di sebutnya sebagai era revolusi telekomunikasi dan informasi sebagai bentuk peradaban Gelombang Ketiga (Toffler,1987;3). Teknologi telekomunikasi dan informasi telah menjadikan dunia ini terasa kecil dan sempit. Manusia dapat berhubungan dan bergaul dengan sesamanya dalam suatu wilayah secara lokal, nasional, maupun internasional dalam waktu yang singkat,cepat tepat akurat dan hampir tanpa sekat. Manusia seakan dalam suatu wilayah kecil yang dapat berhubungan kapan saja dengan mudah. Keadaan inilah yang sering diramalkan Marshall Mc Luhan sebagai "Global Village" (Thomas T Surprenant dan Jane Zande, 1983;222).

Kemajuan yang di capai tersebut tentu saja dapat terlepas dari dampaknya ketika teknologi itu diterapkan. Berbagai kemudahan yang di tawarkan oleh

penggunaan teknologi komunikasi dan informasi mempengaruhi berbagai perubahan dalam suatu masyarakat. Pergesekan dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakatpun menjadi tidak terhindarkan, baik secara struktural maupun kultural. Persoalannya yang kemudian muncul adalah bagaimana dampak arus informasi sebagai akibat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat terhadap masyarakat terutama di negara-negara berkembang. Makalah ini ditulis untuk mencoba menjawab permasalahan tersebut.

Ciri Informasi Negara Berkembang

Arus Informasi Antar Negara

Arus informasi antar negara sering disebut juga dengan istilah *Transborder Data Flow* (TDF). TDF (Transborder Data Flow) sering digunakan dalam pertukaran informasi Internasional. Jane Bortnick dalam artikelnya mengemukakan "TDF may be defined as the flow of digital information across borders for storage or processing in foreign computers (Bortnick : 1995, 164). Artinya TDF adalah aliran informasi digital yang melewati batas negara untuk disimpan dan diproses di negara lain. Aliran atau arus data / informasi tersebut tidak hanya melewati batas negara, tetapi juga lintas politik, budaya dan sosial, dan tidak ada satupun yang menjadi penghambat. Jadi jelasnya TDF adalah transmisi data / pengiriman data secara elektronik melewati batas politik negara untuk diproses dan disimpan dalam file komputer. Istilah TDF sendiri sebenarnya muncul pada tahun 1970-an yang dikemukakan dalam Forum Internasional (International Forum) oleh suatu organisasi yang bernama OECD (Organization of Economic Cooperation and Development). Data / informasi yang biasa dimuat / ditransmisikan beraneka ragam, antara lain :Data perbankan & keuangan, Informasi perusahaan yang berkaitan dengan produksi & perencanaan strategis, Berkas perorangan, Produk dari perusahaan jasa informasi, misalnya; Online database, full text searching, dan lain-lain.

Arus data / informasi yang melewati batas negara ini menjadi suatu perdebatan di kalangan Nasional maupun Internasional, karena TDF (Transborder Data Flow) ini telah membawa pengaruh yang diakibatkan oleh industri informasi itu sendiri. Jadi aliran data lintas negara ini tidak saja memusingkan negara dunia ketiga tetapi juga negara maju. Buktinya negara-negara Eropa kemudian berbondong-bondong" membuat perlindungan data. Jadi intinya mereka melarang data keluar dari kelompok mereka. Hal ini disebabkan karena TDF (Transborder Data Flow) mempengaruhi : *Privacy*. *Privacy* adalah hak keleluasaan pribadi untuk tidak ditekan / dipaksa orang lain. Misalnya kalau data penting menyangkut negara Indonesia, diketahui oleh

Negara lain, apalagi data tersebut diproses di negara lain maka Indonesia akan dengan mudah diserang oleh Negara tersebut. Permasalahan serta perdebatan yang muncul diatas telah melahirkan suatu inisiatif untuk mengadakan perjanjian umum dalam perlindungan data privacy. Perlindungan data privacy itu dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti :

COE (Council of Europe), OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), Council of Europe (COE), menyediakan standar-standar untuk perlindungan privacy perorangan (hak individual) dan mengijinkan peserta penandatanganan (anggota organisasi) untuk membatasi pengiriman data ke negara yang telah menandatangani perjanjian dan tidak menyediakan perlindungan data yang sama. Sedangkan OECD adalah suatu organisasi yang berusaha mendirikan voluntary "Guideliness on the Protection of Privacy and TDF of Personal Data".. Isi OECD Guideliness adalah untuk menyelaraskan hukum privacy nasional yang berbeda dengan menyediakan perjanjian dalam pembatasan koleksi data pribadi mengizinkan individu mengetahui rekamannya.

Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Kebudayaan

Kedaulatan suatu Negara dan kultur suatu budaya dikhawatirkan bisa goyah akibat arus informasi bebas yang datang dari negara lain, terutama negara maju, penghasil informasi, hal ini disebabkan tidak adanya suatu tindakan yang mengatur aliran data lintas batas negara (TDF) tersebut yang bisa menjamin bahawa suatu negara tidak akan kehilangan kontrol akan informasi vital dari kedaulatan bangsa/negaranya. Jika informasi bisa masuk dari luar negeri ke dalam negeri, maka aliran data antar negara (transborder data flow) akan sangat mengganggu & menggelisahkan. Negara tidak bisa mengontrol lagi informasi dan hal ini bisa menghilangkan kedaulatan dari Negara itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Jane Bortnick dalam artikelnya "when critical data are stored or processed in foreign computers a country's "vulnerability" is increased. (Bortnick, 1995: 164) , artinya jika data penting suatu negara disimpan dan diolah didalam komputer asing, maksudnya oleh negara lain terutama negara maju maka negara tersebut akan mudah diserang. Kedaulatan budaya juga bisa hilang karena adanya arus informasi dari luar negeri (negara maju). Misalnya kebudayaan Indonesia bisa hancur akibat pengaruh dari arus informasi yang masuk, yang menampilkan budaya-budaya asing yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Timur. Arus informasi yang mempengaruhi kultur dan budaya Indonesia bisa dalam bentuk media (siaran televisi), film, iklan, yang semuanya menyajikan budaya-budaya Barat, dengan sedikit demi sedikit mengenyampingkan rasa malu, dengan alasan kemodernan dan kepraktisan (pragmatisme). Contoh : mode pakaian, dari yang mini sampai super mini, film-

film yang mengandalkan gaya hidup materialisme, kebebasan dan lain-lain,. Maka tidak dapat dipungkiri apa yang mereka lihat, dengar dan baca tersebut adakalanya bisa merubah persepsi, apresiasi dan pola tingkah laku sehari-hari seperti berbagai kebiasaan, sikap, dan tingkah laku cenderung disesuaikan dengan apa yang mereka nikmati dari media massa itu (Novendra (ed.) : 1995, 15). Hal ini sekali lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bornick "the use of foreign databases, dominance of foreign media, and the broadcasting of news and entertainment programming are considered threats to a country's cultural heritage" (Bornick, 1995: 166), bahwa dominansi penggunaan database (pangkalan data & media asing & program-program siaran baik berita maupun hiburan dianggap sebagai suatu ancaman bagi warisan budaya suatu negara, oleh karena itu cultural sovereignty (kedaulatan budaya) menuntut adanya suatu kontrol/pengawasan atas arus informasi yang melewati perbatasan negaranya.

Bidang Ekonomi

Aliran data lintas batas negara ini ternyata juga telah membawa pengaruh dibidang ekonomi. Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi, yang menghasilkan infrastruktur seperti komputer, internet telah membawa perubahan arah ke informasi yang berdasarkan ekonomi. Perkembangan ini menjadi dasar pertumbuhan jasa industri dalam menyediakan dan meningkatkan produktivitasnya. Tetapi kemudian timbul permasalahan dalam hal pertukaran informasi secara internasional, yaitu masalah penentuan tarif dalam aliran data/informasi lintas negara/wilayah tersebut, adanya diskriminasi harga dan standar yang tidak konsisten serta adanya keharusan dalam pengolahan data / informasi domestik(dalam negeri), sehingga akhirnya beberapa negara sepakat untuk memeberlakukan suatu bea atau pajak pertambahan nilai dalam aliran data lintas batas negara tersebut. Kemudian disepakatilah OECD dan GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) sebagai suatu organisasi yang mengatur kebijakan industri informasi nasional maupun internasional.

Kebijaksanaan Informasi Nasional dan Internasional

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa aliran data/informasi lintas negara itu ternyata tidak hanya membingungkan bagi negara dunia ketiga saja tetapi juga negara maju, sehingga kemudian negara-negara Eropa berbondong-bondong untuk membuat perlindungan data. Tujuannya adalah untuk melindungi privacy masing-masing negara, juga untuk menyelaraskan arus informasi yang tidak seimbang antara negara-negara maju dalam hal ini Amerika Serikat, selaku "pemasok" dan "monopoli" informasi terbesar yang menganut prinsip informasi bebas (free flow of information) Hal ini kemudian disadari oleh

Amerika Serikat, dimana pada konferensi UNESCO ke 19, mereka mengakui telah terjadi ketidakseimbangan arus informasi dikalangan negara-negara berkembang, oleh karena itu AS berjanji membantu negara berkembang mengembangkan kemampuan komunikasinya. Hal ini kemudian mendasari Mac Bride's report yang dikeluarkan pada general conference pada tahun 1980 yang menunjukkan motto, agar arus informasi itu bersifat free and balanced flow of information, dan hal inilah yang paling sangat diharapkan oleh negara-negara berkembang yaitu adanya arus informasi yang seimbang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Free and balanced flow of information ini kemudian mendasari dibentuknya sensor, artinya negara berkembang berhak memilih informasi-informasi apa saja yang sesuai dengan kebutuhan budaya, politik masing-masing negara, sehingga apabila hal ini terwujud maka negara berkembang akan terhindar dari apa yang dikatakan dengan "imperialisme informasi dan komunikasi, kemudian diterapkannya kode etik internasional untuk wartawan, sehingga data/informasi tidak begitu saja dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Yang diatur dalam kebijaksanaan informasi tersebut adalah :

- Tempat pemasaran informasi sebagai komoditi dan layanan, misalnya, pemberian izin siaran televisi, radio, penggunaan satelit komunikasi, dan lain-lain
- Pengumpulan dan penyebaran informasi, misalnya informasi rekam media audio visual ada pengaturannya kepada siapa itu diberikan
- Pengaturan perusahaan yang ada hubungannya dengan informasi
- Aturan perlindungan hak cipta
- Alokasi spektrum penyiaran dan tarif (GATT) dan pengalokasian data
- Pengaturan perlindungan personal privacy
- Pengaturan perdagangan dan tarif
- Untuk penggunaan sarana telekomunikasi ada suatu badan yang mengatur penggunaannya yaitu ITU (international Telecommunication Union) yaitu perwakilan PBB yang mengatur & mengawasi penggunaan spektrum telekomunikasi melalui beberapa perjanjian. ITU juga bertanggung jawab terhadap pengalokasian frekuensi radio, terhadap beberapa penggunaan televisi gelombang pendek & penggunaan satelit untuk komunikasi anggotanya terdiri dari 1/4 negara Eropa & Amerika & 1/4 negara berkembang

Sensor Informasi dan Copyright

Arus informasi antar negara seperti telah dijelaskan lebih bersifat satu arah (one way information), yaitu dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Arus informasi yang demikian tidak selamanya menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang menjadi konsumen. Hal ini karena tidak

jarang informasi yang ada atau yang diterimanya menimbulkan masalah di dalam masyarakat atau membahayakan kelangsungan atau kedaulatan negara. Oleh karena itu bagi negara-negara berkembang merasa perlu untuk menerapkan kebijakan penyeleksian terhadap informasi yang masuk ke wilayah negaranya. Dalam hal ini suatu negara kemudian menerapkan atau membentuk lembaga yang berfungsi untuk menyeleksi atau melakukan sensor terhadap informasi yang masuk ke suatu wilayah atau yang dapat dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia misalnya dibentuk Badan Sensor Film (BSF) yang bertugas menyeleksi film-film yang dapat beredar di tengah-tengah masyarakat.

Di samping perlunya penyensoran terhadap informasi yang masuk, negara-negara berkembang juga menghadapi masalah copyright atau hak cipta. Negara-negara berkembang pada umumnya sangat membutuhkan berbagai informasi terutama informasi mengenai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, kebutuhan akan informasi tersebut sering dihadapkan pada kepemilikan suatu informasi. Bagi negara-negara maju menghendaki agar seluruh informasi yang dihasilkannya mendapatkan perlindungan semestinya, atau menginginkan adanya peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan kepemilikan informasi atau copyright.

Oleh karena itu akhirnya diputuskan untuk membuat suatu undang-undang perlindungan data yang bisa mengatur mekanisme hak cipta di dunia, melalui suatu konferensi seperti :tentang hak cipta yang kemudian melahirkan : *Berne Convention*, 1886, pencetusnya Inggris, Jerman, Italia, dan Perancis. Tujuannya melindungi karya-karya mereka, masa berlakunya 50 tahun setelah meninggal dunia ; *Universal copyright convention (UCC)*, 1995, terbentuk atas prakarsa Amerika Serikat, UNESCO & beberapa negara berkembang yang merasa tidak puas dengan *Berne Convention*. Masa berlakunya 25 tahun setelah meninggal. UCC banyak memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang untuk menterjemahkan karya asing sesudah negara yang bersangkutan dengan segala upaya meminta kepada pemilik hak cipta untuk menterjemahkan karya tersebut, namun ditolak. Lisensi ini hanya berlaku 3 tahun & tidak dapat diperbaharui jika pemilik asli telah menterjemahkan karya tersebut kedalam bahasa yang sama. Lisensi ini diberikan untuk kegiatan pengajaran dan pendidikan dan tidak boleh diekspor. Dalam UCC ini, negara berkembang dapat memperoleh lisensi melalui Lembaga International Copyright Information yang didirikan oleh UNESCO. Keuntungan UCC bagi negara berkembang, negara berkembang bisa mengakses informasi dari negara-negara lain dengan baik karena bisa menterjemahkan karya-karya tersebut.

Ada 2 prinsip umum tentang perlindungan data/informasi Internasional :

1. Lex Loci yaitu memberikan perlindungan hukum bagi sebuah karya dimanapun karya itu berada sesuai dengan perlindungan dimanapun pencipta itu berasal
2. Lex Fori (national assimilation) yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap karya asing sesuai dengan hukum yang ada di negara tempat karya itu berada.

Dampak Informasi Bagi Masyarakat Negara Berkembang : Suatu Fenomena Multidimensional

Informasi seperti dinyatakan Ronald Bengé (1979: 191) merupakan proses yang mencakup komponen-komponen personal dan sosial. Artinya, bahwa suatu informasi tidaklah semata-mata apa yang dipahami oleh perseorangan, akan tetapi juga terkait dengan fungsi-fungsi sosialnya. Dengan kata lain, informasi betapun 'obyektif' diasumsikan, tidak bisa dipisahkan dari sistem nilai dan *concern* kultural produsennya.

Pengertian informasi sebagaimana dinyatakan tersebut di atas memberikan indikasi bahwa informasi tidaklah sesuatu yang bebas nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu informasi dapat merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan sebaliknya juga dapat merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Arus informasi seperti juga telah disebutkan di atas berasal dan didominasi oleh negara-negara maju yang notabene adalah negara-negara Barat. Tidak jarang informasi yang diproduksi oleh negara-negara maju tersebut sarat dengan muatan-muatan atau kepentingan-kepentingan tertentu, baik secara sosial kultural, ekonomi, maupun politis. Lyotard (1986: 5) dalam salah satu tulisannya mengemukakan :

"Ada kemungkinan bahwa negara-negara/bangsa pada suatu hari akan berjuang untuk dapat menguasai informasi, persis seperti mereka berjuang di masa lalu untuk menguasai wilayah, dan kemudian menguasai akses ke—dan mengeksploitasi— bahan-bahan mentah dan tenaga murah. Sebuah bidang baru terbuka bagi strategi—strategi industrial dan komersial di satu pihak, dan strategi-strategi politis serta kemiliteran di lain pihak".

Ungkapan tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa informasi akan memegang peran penting bagi suatu negara. Peran tersebut tidak saja melihat informasi sebagai suatu komoditi, akan tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pengendali atau kontrol politis dan militer. Dengan demikian pernyataan tersebut menguatkan bahwa arus informasi bagi suatu wilayah atau negara tertentu memerlukan tanggapan dan sikap yang proporsional.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memang dapat dijadikan alat kontrol yang canggih, bukan hanya dalam satu wilayah negara tertentu saja, tetapi juga telah menjadi kontrol terhadap negara lain. Dari sinilah kemudian muncul apa yang disebut sebagai "dominasi" yang melahirkan kolonialisasi. Berbagai istilah seperti penjajahan informasi, dominasi budaya, kolonialisme elektronika merupakan gambaran kritik dari mereka yang berada digaris marginal dalam memandang arus informasi sebagai dampak teknologi informasi. Teknologi informasi bagi mereka dinilai hanya menguntungkan segelintir orang, beberapa perusahaan multinasional, dan sejumlah negara maju.

Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan dampak arus informasi bagi masyarakat di negara-negara berkembang, antara lain :

Analisis Sosial Kultural

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan akibat arus informasi bebas pada masyarakat negara berkembang adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya yang disebarkan lewat media massa, dan sarana telekomunikasi lainnya. Akibat teknologi informasi yang begitu pesat, maka telah terjadi globalisasi media massa dan informasi, di mana peran telekomunikasi serta media elektronik menjadi luar biasa. Dunia menjadi kosmopolitan dan manusia saling mempengaruhi dalam hal perilaku, baik perilaku sosial, politik maupun budaya. Kemudian dikatakan bahwa "dampak atau konsekuensi globalisasi media massa dan informasi adalah terbukanya semua macam saluran komunikasi masyarakat di negara masing-masing. Akibat yang lebih jauh (rentetan akibat) ialah, sulitnya mengendalikan arus nilai-nilai kosmopolit (asing) di suatu negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Meskipun globalisasi informasi dan media massa tidak lagi terlalu relevan untuk dipersoalkan dari sudut isu ketimpangan arus informasi dan komunikasi dunia (internasional), tetapi muncul masalah, yaitu siapa yang mengontrol dan nilai budaya apa yang dominan dalam globalisasi media itu. (Kuswandi : 1996, 3)

Arus informasi yang membawa dampak / pengaruh pergeseran kultural bagi masyarakat negara berkembang dapat disampaikan lewat salah satu teknologi media yaitu televisi. Televisi yang merupakan gabungan dari media dengar dan gambar dapat menyampaikan isi pesan atau informasi kesemua negara dan wilayah, bahkan kewilayah kecil sekalipun. Televisi merupakan teknologi yang mampu menerjang dan menerobos batas-batas suatu negara. Jadi, bila informasi media televisi dari berbagai belahan dunia tidak terkontrol maka akan menimbulkan efek yang cukup besar, misalnya penjajahan negara dalam hal informasi. Hal ini dikarenakan adanya satelit komunikasi, sehingga cakrawala informasi menjadi semakin luas. "Peristiwa di satu tempat, dapat

dilihat ditempat lain melalui televisi dengan pola teknologi baru, yaitu "Direct Broadcasting Satellite (DBS)" (Kuswandi : 1996, 8)

Jaringan-jaringan televisi terbesar di dunia saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat, diantaranya "America Broadcasting Company" (ABC), "Columbia Broadcasting System (CBS) dan "National Broadcasting Company" (NBC). Jaringan stasiun televisi tersebut menghubungkan semua stasiun televisi di seluruh dunia. Beberapa contoh stasiun televisi asing yang banyak mempengaruhi kultur/budaya masyarakat negara berkembang, (dalam hal ini Indonesia, sebagai contoh) adalah CNN internasional adalah jaringan penyiaran yang menyajikan berita 24 jam sehari, hasil kerjasama para wartawan dari 29 kantor berita diseluruh dunia. CNN internasional dipancarluaskan melalui jaringan 11 satelit internasional dan dinikmati para penonton tv kabel dan satelit di seluruh dunia. Meski berpusat di Atlanta Amerika Serikat, tetapi program CNN ditujukan untuk penonton Internasional di 210 negara. Kemudian adalah stasiun televisi asing lain yaitu HBO adalah televisi untuk film-film dan acara hiburan yang tersaji 24 jam non-stop tanpa iklan. Lebih dari 70 film pilihan setiap bulan, berupa film unggulan di Hollywood, film asli HBO, musik, komedi serta dokumenter dan acara hiburan keluarga dapat dinikmati dengan tata suara stereo. HBO menyebut dirinya sebagai The World's Greatest Movie Channel, belum lagi stasiun TV MTV yang sudah sangat ramah dikenal oleh negara Indonesia. Semua informasi yang dimuat dalam siaran-siaran televisi tersebut disadari atau tidak telah merubah tatanan budaya masyarakatnya. Indonesia, misalnya sebagai salah satu negara berkembang, yang dahulu terkenal dengan budaya Ketimurannya sekarang telah terkena imbas atau terpolusi oleh budaya Barat yang menawarkan gaya/pola hidup Kebarat-baratan, dari mulai mode/design pakaian, makanan maupun minuman yang bernuansa "Barat", yang semuanya itu dapat dengan mudah ditemukan di mall-mall yang juga merupakan produk arus informasi. Belum lagi gaya/pola hidup materialisme yang ditawarkannya, yaitu gaya hidup yang menTuhankan materi diatas segalanya, sehingga gaya hidup ini kemudian mempengaruhi nilai-nilai spritualisme masyarakat itu sendiri. Jadi tampak jelas bahwa begitu besar budaya Barat ini mempengaruhi negara berkembang, tak terkecuali Indonesia sehingga "di Iran pengaruh Barat dianggap "setan", dan ditolak keras atas nama agama. Di Filipina, Malaysia dan Sudan, bahasa Inggris dibatasi penggunaannya untuk minimalisasi pengaruh budaya Barat, karena penyebaran produk-produk budaya Barat menggunakan bahasa Inggris. Di Singapura juga terdapat kecemasan yang meningkat mengenai Westernisasi, sampai-sampai Lee Kwan Yee pernah melakukan kampanye bahasa Mandarin untuk mengurangi Westernisasi (Naisbit dan Aburdene, 1990 :125-137)

Analisis Sosial Politik

Isu-isu politik seperti kebebasan, persamaan, hak azasi manusia, dan demokratisasi sering menjadi efektif jika disalurkan melalui berbagai media komunikasi. Dalam hal ini pers mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai isu-isu politis melalui media massa. Dalam kenyataannya isu-isu tersebut mampu merubah pandangan dan sekaligus sikap masyarakat terhadap negara.

Di negara-negara maju, isu-isu politik seperti disebutkan di atas telah mendapatkan perhatian yang cukup besar. Berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk menjamin kehidupan berpolitik masyarakat. Kemudian undang-undang atau peraturan ini disebarluaskan secara nasional maupun internasional agar negara-negara di dunia mengetahui bahwa negara-negara tersebut sangat menghargai kemanusiaan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya karena mempunyai pers yang kuat sering diberitakan sebagai negara yang paling demokratis, negara yang menjunjung tinggi kebebasan, menghormati HAM, dan menghargai perbedaan.

Sementara itu negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin sering digambarkan sebaliknya. Negara-negara berkembang tersebut sering diidentikkan dengan terorisme, suka melanggar HAM, diskriminatif, otoriter, dan sebagainya. Satu contoh kecil, Indonesia dalam berbagai pemberitaan pers asing sering dianggap sebagai negara yang paling banyak melanggar hak azasi manusia. Pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur lebih sering dikaitkan dengan Indonesia sebagai pelakunya.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa secara politis, arus informasi yang berkembang di negara-negara berkembang sering kali sepihak karena data-data dan informasi yang ada berasal dari luar. Meskipun demikian, harus juga diakui bahwa isu-isu politik yang dilontarkan oleh pers asing juga dapat membawa pengaruh positif bagi kehidupan politik di negara berkembang. Timbulnya reformasi di Indonesia, tidaklah semata-mata kesadaran masyarakat Indonesia, akan tetapi juga dipicu dari berbagai isu-isu politis yang sebarluaskan melalui berbagai media massa.

Analisis Sosial Ekonomi

Dalam sebuah artikel yang berjudul "International Markets for Information Goods and Services" dikatakan bahwa informasi sebagai suatu komoditi. Artinya informasi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Di masa mendatang negara tidak hanya menaruh perhatian pada ekspor sektor industri fisik dan manufaktur saja, tetapi lebih kepada sektor jasa dan informasi, hal ini didasari oleh kesadaran bahwa saat ini jasa informasi benar-benar telah menjadi suatu komoditi yang

menghasilkan. Dampak yang nyata akibat arus informasi yang masuk pada sisi ekonomi adalah telah terjadinya "suatu perdagangan bebas", atau "globalisasi ekonomi" dimana investor asing dengan modal yang dimilikinya dapat menanamkan sahamnya ke negara mana saja yang diinginkannya, hal ini tentu saja bisa mematikan investor domestic dalam menanamkan sahamnya karena didominasi oleh pihak luar yang lebih bermateri dan berteknologi.

Kesimpulan

Untuk dapat memperoleh manfaat informasi dan dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi Internasional negara dunia ke-3 atau negara berkembang harus menemukan, mengetahui bahwa mereka sebenarnya mempunyai produk & kekayaan informasi sendiri yang bisa dijadikan komoditi dan mempunyai nilai jual, oleh karena itu perlu adanya suatu kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi, karena dengan keterbatasan pengetahuan negara berkembang hanya akan berada pada posisi "konsumen", objek dan "sasaran" bagi negara Barat (maju) dalam menyebarluaskan segala bentuk informasi yang diciptakannya, tanpa memandang dampak dari arus informasi yang ditimbulkannya.

Keadaan ini telah dimanfaatkan oleh Negara maju untuk mengembangkan suatu konsep informasi yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Konsep atau prinsip informasi itu mereka sebut sebagai "Free Flow of Information" atau arus informasi bebas, artinya Negara maju selaku "produsen" informasi berhak untuk menciptakan dan menyebar luaskan informasinya, guna kepentingannya, terutama kepentingan ekonomi secara bebas, hal ini menyebabkan arus informasi yang masuk ke Negara berkembang sifatnya hanya "satu arah saja" atau biasa disebut "one way of information". Hal ini tentu saja bertentangan dengan Negara berkembang yang menganggap tidak semua data/informasi yang diberikan oleh Negara maju bermanfaat bagi Negara penerima, bahkan kadang-kadang menimbulkan kecurigaan apakah data itu berkualitas atau tidak. Oleh karena itu Negara berkembang menolak konsep "Free Flow of Information" yang dikemukakan oleh Negara super power dan menghendaki konsep arus informasi yang seimbang (free and balanced flow of information), yang mengarah pada two ways of information yaitu "informasi dua arah", artinya informasi yang diterima tidak hanya diolah oleh Negara maju saja, tetapi terjadi mutualisme, kebergantungan dan keberuntungan informasi dari kedua belah pihak, baik dari Negara maju maupun dari Negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrend 2000*. Jakarta: Bina Aksara.
- Suprenant, Thomas T. dan Jane Zande. 1983. The Developing Crisis in Information : A Librarian's Perspective. *IFLA Journal*. Vol. 3 (3).
- Toffler, Alvin. 1987. *Reviews and Premisses*. Jakarta: Panca Simpati.
- Bortnick, Jane. 1995. National and International Information Policy. *Journal of the American Society For Information Science*.
- Benge, Ronald C. 1979. *Cultural Crisis and Libraries in the Third World*. London: Clive Bingley. Dalam Ziauddin Sardar: 1996. *Tantangan Dunia Islam Abad 21 : Menjangkau informasi*. Bandung: Mizan.
- Lytard, Jean-Francois. 1986. *The Post-Modern Condition : A Report on Knowledge*. Manchester University Press. Dalam Ziauddin Sardar. 1996. *Tantangan Dunia Islam Abad 21 : Menjangkau informasi*. Bandung: Mizan.
- Sardar, Ziauddin. 1996. *Tantangan Dunia Islam Abad 21 : Menjangkau informasi*. Bandung: Mizan.
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa : Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novendra (ed.). 1996. *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi Terhadap kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Di daerah Riau*. Riau: Proyek Pengkajian dan Penelitian Nilai-Nilai Budaya.
- Ali, Novel. 199-. *Peradaban Komunikasi Politik : Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.